

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan masih menjadi masalah bagi negara – negara di dunia, termasuk juga Indonesia. Sebagaimana pendapat dari Yacoub, 2012 (dalam Debrina Vita Ferezagia, 2018) menyebutkan bahwa kemiskinan sebagai masalah global yang dihadapi banyak negara dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar kehidupan manusia. Hal yang sama juga disampaikan oleh Hardinandar, 2019 (dalam Laga Priseptian, et. al, 2022) mengatakan bahwa kemiskinan adalah kondisi dimana tidak mempunya seseorang dalam memenuhi kebutuhan seperti makanan, pakaian, obat – obatan, dan tempat tinggal.

Penyebab terjadinya kemiskinan itu sendiri disebabkan oleh beberapa hal sebagaimana yang dikemukakan oleh Larasati Prayoga, et. al, 2021 (dalam Laga Priseptian, et.al 2022) meliputi : upah minimum yang tidak memadai, taraf hidup masyarakat yang buruk, dan angka pengangguran yang mengalami peningkatan setiap tahunnya tanpa adanya penambahan kesempatan (peluang) kerja. Pendapat lain dikemukakan oleh Tadoro, 1994 (dalam Bariyyatin Nafi'ah, 2021) yang menyebutkan penyebab kemiskinan di negara berkembang yaitunya : jumlah penduduk, pendapatan, dan letak geografis yang berbeda, sejarah negaranya yang berbeda antar satu sama lainnya, perbedaan kekayaan SDA dan kualitas SDM, adanya perbedaan peranan sektor swasta dan negara, struktur industri yang berbeda, tingkat ketergantungan kekuatan ekonomi dan politik dengan negara lain yang

berbeda, dan perbedaan dalam pembagian kekuasaan pada struktur politik dan lembaga dalam negeri.

Berikut ini data mengenai persentase kemiskinan di Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

Tabel 1. 1
Kemiskinan Indonesia 2017-2021

No	Tahun	Persentase Kemiskinan			
		Perkotaan		Pedesaan	
		Maret	September	Maret	September
1	2017	7,72	7,26	13,93	13,47
2	2018	7,02	6,89	13,20	13,10
3	2019	6,69	6,56	12,85	12,60
4	2020	7,38	7,88	12,82	13,20
5	2021	7,89	7,60	13,10	12,53

Sumber : Badan Pusat Statistik (2021)

Tabel 1.1 gambaran mengenai kemiskinan di Indonesia selama kurun waktu 5 tahun terakhir yang dilihat berdasarkan penduduk perkotaan maupun pedesaan. Secara umum berdasarkan data tersebut baik itu kemiskinan di wilayah perkotaan maupun pedesaan mengalami fluktuasi angka kemiskinan. Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 untuk kemiskinan di wilayah perkotaan baik itu pada perhitungan per Maret maupun per September mengalami penurunan. Kemudian, pada tahun 2020 dan 2021 mengalami peningkatan kembali. Sedangkan untuk kemiskinan di wilayah pedesaan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 juga mengalami penurunan. Akan tetapi, pada tahun 2020 pada per Maret maupun per September nya mengalami peningkatan dan pada tahun 2021 pada per Maret dan per September nya pun mengalami penurunan kembali.

Adanya masalah kemiskinan ini nyatanya akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Christanti, 2013 (dalam Noor Zuhdiyaty, 2017) bahwasanya kemiskinan di dalam negara atau daerah terkait adalah bentuk gambaran dari tingkat atau derajat kesejahteraan penduduk yang tinggal di dalam negara atau daerah tersebut. Dalam hal ini kaitannya dengan data pada tabel 1.1 adalah tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan persentasenya lebih tinggi dibandingkan di wilayah perkotaan. Dengan demikian akan berdampak terhadap kesejahteraan yang didapatkan oleh masing – masing individu maupun kelompok yang ada.

Menanggapi permasalahan kemiskinan yang ada di Indonesia, pemerintah mengeluarkan landasan yuridis berupa UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Regulasi tersebut menyebutkan bahwa adanya suatu kebijakan, program, kegiatan pemberdayaan, fasilitas, dan pendampingan sebagai usaha terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar atau pokok setiap warga negara.

Pada pasal 7 ayat 1 dan 2 UU No. 13 Tahun 2011 dijelaskan bahwa di dalam penanganan terhadap fakir miskin perlu diadakan suatu upaya pengembangan potensi diri serta pemberdayaan lembaga masyarakat serta masyarakatnya itu sendiri. Dalam pasal 12 UU No. 13 Tahun 2011 juga dijelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu bentuk pengembangan potensi diri masyarakat melalui bimbingan secara mental, spiritual, dan keterampilan.

Peranan dari adanya pemberdayaan masyarakat dinilai sangat penting dalam hal mengurangi ketimpangan kesejahteraan pada masyarakat. Hakekatnya, masyarakat yang sudah sejahtera pada umumnya memiliki kemandirian dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam artian, mereka tidak lagi bergantung pada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Di sisi lain, mereka yang kurang berdaya membutuhkan bantuan dari pemerintah, dermawan, dan sektor masyarakat lainnya.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial RI sebagai salah satu fasilitator dalam memberikan bantuan kepada masyarakat. Hal ini tertuang di dalam Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial yang mana disebutkan bahwa dalam rangka membantu presiden menyelenggarakan pemerintahan negara dan inklusivitas maka diselesenggarakan urusan pada bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin (*dikutip melalui laman kemensos.go.id*).

Salah satu bentuk program pemberdayaan kepada masyarakat dari Kemensos RI adalah program bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE). KUBE sebagai usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial keluarga miskin yang mana melalui proses pembentukan kelompok, tumbuh, dan berkembang (tertuang di dalam Permensos No. 2 Tahun 2019). Keanggotaan KUBE terdiri atas 5 – 20 kepala keluarga dari masyarakat miskin yang tercatat dalam data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu (DTPPFMOTM).

Dasar hukum KUBE meliputi : (1) UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin sebagaimana telah dijelaskan diatas. (2) UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang mana menjelaskan kesejahteraan sosial sebagai keadaan dimana sudah terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar nantinya hidup dengan layak dan mampu mengembangkan diri dalam rangka melaksanakan fungsi sosialnya. (3) Permensos No. 25 Tahun 2015 tentang Kelompok Usaha Bersama yang mengalami perubahan menjadi Permensos No. 2 Tahun 2019 yang menyebutkan KUBE sebagai usaha dalama rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial keluarga miskin yang mana melalui proses pembentukan kelompok, tumbuh, dan berkembang

Implikasi dari program KUBE sendiri dilimpahkan kepada daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai pemberdayaan masyarakat melalui program KUBE sebagai berikut : 1) penelitian yang dilakukan oleh Reka Dwi Mashitoh, Nurul Umi Ati, dan Suyeno dengan judul penelitiannya adalah pemberdayaan masyarakat melalui program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Studi KUBE Cempaka, Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa program KUBE sudah sesuai dengan apa yang diharapkan, walaupun belum sepenuhnya namun indikatornya sudah mulai terlihat diantaranya : (1) kesejahteraan masyarakat yang mulai membaik dengan adanya program pemberdayaan masyarakat sehingga output yang dihasilkan lebih maksimal berdampak terhadap pendapatan masyarakat, (2) penghambat dalam pemberdayaan masyarakat disebabkan oleh modal yang terbatas sehingga program

yang sudah ada menjadi terhambat, ditambah lagi keadaan pasar yang sepi dan persaingan yang ketat, serta terbatasnya bahan baku lokal.

2) penelitian yang dilakukan oleh Wulpiah dengan judul penelitiannya adalah implikasi pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) terhadap pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bangka. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel implementasi program KUBE tidak berpengaruh terhadap pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bangka. Variabel struktur proses implementasi program KUBE berpengaruh terhadap pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bangka. Sedangkan variabel faktor eksternal yang mempengaruhi implementasi program KUBE berpengaruh terhadap pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bangka.

3) penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hidayat Nasmi dan Karjuni dengan judul penelitiannya adalah pemberdayaan masyarakat miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Bintan Timur oleh Dinas Sosial Kabupaten Bintan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa program KUBE belum mampu meningkatkan masyarakat yang tergabung dalam program tersebut. Hal ini terlihat pada beberapa KUBE yang mengalami kesulitan dalam pemasaran untuk memasukkan produknya ke supermarket, minimarket, serta bazar dikarenakan tidak diberikan kemudahan dalam pengurusan label halal dan izin BPOM.

Penelitian ini berfokus kepada KUBE yang ada di Kecamatan Rambatan, Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan pemaparan dari Kabid Pemberdayaan Sosial

Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kab. Tanah Datar mengatakan bahwa di Kabupaten Tanah Datar masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan paling banyak terdapat di Kecamatan Rambatan, Kecamatan Batipuh, Kecamatan X Koto, dan Kecamatan Lintaubuo Utara. Dari kecamatan tersebut terpilih-lah Kecamatan Rambatan sebagai penerima bantuan KUBE oleh Kementerian Sosial RI pada tahun 2019 (*dikutip dari berita Prokabar.com terbitan tahun 2019*).

Kecamatan Rambatan terdiri atas 5 Nagari yaitu : (1) Nagari Rambatan, (2) Nagari Padang Magek, (3) Nagari III Koto, (4) Nagari Balimbing, dan (5) Nagari Simawang. Bantuan KUBE untuk Kecamatan Rambatan diberikan kepada 8 kelompok KUBE yang terdistribusi di 5 Nagari yang ada. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil studi kasusnya di wilayah Nagari Balimbing dengan pertimbangannya adalah Nagari Balimbing diketahui sebagai nagari peringkat 2 dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Kecamatan Rambatan berdasarkan data pada tahun 2018. Sebagaimana dijelaskan melalui data berikut ini.

Tabel 1. 2
Kemiskinan Kec. Rambatan

No	Nagari	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase
1	Rambatan	2.383	15,57 %
2	Padang Magek	2.497	16,31 %
3	III Koto	3.217	21,02 %
4	Balimbing	3.453	22,56%
5	Simawang	3.754	24,53 %

Sumber : Eka Kharisma (2021)

Nagari Balimbing terdiri atas 5 Jorong meliputi : (1) Kinawai, (2) Balimbing, (3) Bukit Tamasu, (4) Sawah Kareh, (5) Padang Pulai. Untuk bantuan KUBE sendiri di Nagari Balimbing diberikan kepada 2 Jorong yaitunya Jorong

Bukit Tamasu dan Sawah Kareh. Dikarenakan adanya pandemi Covid 19 KUBE di Jorong Sawah Kareh berhenti (bubar). Oleh karenanya, hanya satu KUBE yang masih berfungsi yaitu nya KUBE Palano Jaya yang berada di Jorong Bukit Tamasu. Berikut adalah gambar dari papan nama dari KUBE Palano Jaya.

Gambar 1. 1
Papan Nama KUBE Palano Jaya



Sumber : Dokumentasi Pribadi

Gambar 1.1 adalah papan nama sebagai tanda pengenal dari KUBE yang ada di Jorong Bukit Tamasu yaitunya KUBE Palano Jaya. Papan nama tersebut diletakkan di lokasi rumah dari ketua KUBE Palano Jaya.

Berdasarkan pra survei yang peneliti lakukan, KUBE Palano Jaya terbentuk pada Oktober 2019 dengan usaha yang dijalankan adalah dagang barang harian atau usaha kelontong. Alur dari proses pembentukan KUBE Palano Jaya sederhananya adalah (1) Wali Jorong selaku perwakilan pemerintah nagari, mengumpulkan nama warganya yang tercatat di dalam DTKS kemudian menyerahkannya kepada pemerintah nagari, (2) pemerintah nagari mengajukan nama – nama tersebut kepada Dinas Sosial & PPPA Kab. Tanah Datar, (3) setelah menerima nama – nama

tersebut, dinas sosial memverifikasi data untuk dikirimkan kepada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, dan (4) finishing nya pada dinas provinsi untuk dikirimkan kepada pusat (Kemensos RI).

Dalam keberjalanannya lebih kurang dalam kurun waktu 2 tahun ini, ada beberapa permasalahan yang dihadapi KUBE Palano Jaya berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pendamping KUBE Palano Jaya pada Jum'at, 25 Maret 2022.

1. Jumlah anggota KUBE Palano Jaya yang berkurang dari awalnya berjumlah 10 orang menjadi 4 orang
2. Pembukuan atau administrasi keuangan KUBE Palano Jaya yang belum baik dan rapi dalam penulisannya
3. Usaha kelontong berjalan kurang lebih 1 tahun, kemudian diganti dengan alat pertanian kipas padi dan simpan pinjam anggota KUBE
4. Monitoring yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial & PPPA Kab. Tanah Datar sudah lama tidak ada semenjak satu tahun kebelakang

Berdasarkan identifikasi permasalahan diatas, peneliti tertarik meneliti lebih lanjut pada KUBE Palano Jaya untuk melihat lebih dalam bagaimana proses pelaksanaan pemberdayaan pada KUBE Palano Jaya serta dampak yang ditimbulkan setelah adanya bantuan usaha ini terhadap KUBE Palano Jaya. Oleh sebab itu, peneliti mengangkat judul penelitian "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Nagari Balimbing, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat."

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pemberdayaan kepada kelompok penerima bantuan KUBE di Jorong Bukit Tamasu, Nagari Balimbing?
2. Apa saja dampak yang ditimbulkan setelah adanya pemberdayaan kepada kelompok penerima bantuan KUBE di Jorong Bukit Tamasu, Nagari Balimbing?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pelaksanaan pemberdayaan kepada kelompok penerima bantuan KUBE di Jorong Bukit Tamasu, Nagari Balimbing.
2. Untuk menganalisis dampak yang ditimbulkan setelah adanya pemberdayaan kepada kelompok penerima bantuan KUBE di Jorong Bukit Tamasu, Nagari Balimbing.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini sebagai implikasi dari teori yang didapatkan di dunia perkuliahan dan diharapkan akan menambah khazanah baru bagi ilmu pengetahuan serta pengembangan bagi disiplin ilmu pengetahuan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1.4.2.1 Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai bentuk penerapan teori secara tertulis terhadap ilmu yang sudah didapatkan oleh penulis di dunia perkuliahan. Selain itu,

diharapkan penelitian ini sebagai bentuk kepekaan sosial penulis mengenai masalah sosial yang ada di masyarakat.

1.4.2.2 Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran kepada pemerintah untuk mengambil serangkaian tindakan terkait pemberdayaan (program) untuk masyarakat sasaran. Sehingga nantinya masalah sosial yang ada dapat ditangani dengan baik.

1.4.2.3 Bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini, diharapkan masyarakat sasaran semakin tereduksi mengenai program pemberdayaan yang diberikan oleh pemerintah sehingga dapat memaksimalkan bantuan yang diberikan.

1.5 Kerangka Teoritis

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bagian dari usaha peneliti untuk menemukan perbandingan dan inspirasi baru untuk penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, penelitian terdahulu digunakan untuk memposisikan penelitian dan menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Pada bagian ini peneliti membuat daftar berbagai temuan penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Di bawah ini adalah beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian peneliti.

Tabel 1. 3
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode	Aspek yang Diteliti	Hasil Penelitian Jurnal dan Perbedaan dengan Penelitian ini
1	Isti'ana Yuliartati (2019)	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Jawa Tengah	Metode kualitatif	Tahapan pemberdayaan melalui KUBE meliputi : 1. Tahap penyadaran 2. Tahap identifikasi kebutuhan dan perencanaan 3. Tahap pelaksanaan 4. Tahap pengembangan 5. Tahap evaluasi	Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa pemberdayaan melalui KUBE hasilnya meliputi : 1) Mampu memenuhi kebutuhan sehari – hari 2) Pendapatan Ibu – Ibu mengalami peningkatan 3) Adanya partisipasi para anggota kelompok KUBE

					Perbedaan dengan penelitian ini adalah : 1. Perbedaan lokasi penelitian, di dalam penelitian ini lokasinya di wilayah Nagari Balimbing, Kecamatan Rambatan, Sumatera Barat 2. Tahapan pemberdayaan yang diteliti juga ada beberapa perbedaan, peneliti tidak menyertakan tahapan penyadaran di dalam penelitian ini
2	Eka Wildanu, Annisa Rengganis, dan Riyan (2021)	Pemberdayaan Keluarga Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Metode Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> - Proses pembentukan KUBE meliputi : tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyerahan bantuan - Proses pendampingan meliputi : intensitas pertemuan dan pembinaan kepemimpinan kelompok serta pembukuan KUBE - Kemitraan usaha dengan pihak lain 	Pemberdayaan masyarakat pada KUBE yang ada di Desa Purwawinangun umumnya sudah berjalan dengan lancar dan tepat sesuai sasaran sebagai program penguatan masyarakat miskin. Dalam pelaksanaannya ada melibatkan <i>stakeholders</i> dan sudah memenuhi standar sebagai pemberdayaan masyarakat. Namun, masih ada beberapa aspek pemberdayaan masyarakat yang belum terlaksana secara optimal. Perbedaan dengan penelitian ini adalah : 1. Proses pemberdayaan dilihat dari sudut pandang yang berbeda, dimana fokus peneliti kepada tahap

					<p>pemberdayaan sesuai dengan pedoman KUBE</p> <p>2. Dalam penelitian ini peneliti juga melihat dampak yang ditimbulkan dengan adanya bantuan KUBE ini</p>
3	Wulpiah (2019)	Implikasi Pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Terhadap Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Bangka	Metode Kuantitatif	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel X1 : pelaksanaan KUBE - Variabel X2 : struktur proses implementasi program KUBE - Variabel X3 : faktor eksternal yang mempengaruhi implementasi program KUBE 	<p>Variabel pelaksanaan KUBE nya menunjukkan tidak ada pengaruhnya terhadap pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bangka. Sedangkan untuk variabel struktur proses program KUBE menunjukkan ada pengaruhnya terhadap pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bangka. Serta variabel faktor eksternal yang memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan program KUBE juga menunjukkan pengaruh terhadap pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bangka.</p> <p>Perbedaan dengan penelitian ini :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif 2. Indikator yang diteliti berbeda, dikarenakan penelitian ini sifatnya deskriptif kualitatif

4	Muhammad Hidayat Nasmi (2019)	Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Bintan Timur oleh Dinas Sosial Kabupaten Bintan	Metode Kualitatif	<p>Analisis pemberdayaan masyarakat fakir miskin melalui KUBE dilihat dari beberapa indikator meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Motivasi - Pelatihan - Modal 	<p>Program KUBE nya belum mampu meningkatkan masyarakat yang tergabung di dalamnya. Hal demikian terlihat ada beberapa KUBE yang mengalami kesulitan dalam pemasaran dikarenakan tidak mendapatkan label halal dan izin dari BPOM. Sedangkan hal tersebut merupakan kebutuhan supermarket dan minimarket serta bazar yang dibuat oleh swasta.</p> <p>Perbedaan dengan penelitian ini :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indikator pemberdayaan yang digunakan berbeda 2. Lokasi penelitian yang juga berbeda
5	Bisri Mustofa (2021)	Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kalurahan Gulurejo Kapanewon Lendah Kabupaten Kulon Progo	Metode Kualitatif	<p>Tahapan pemberdayaan masyarakat miskin melalui KUBE :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tahap penyadaran - Tahap peningkatan kapasitas - Tahap perlindungan sosial 	<p>Pemberdayaan masyarakat miskin melalui KUBE di Gulurejo dilaksanakan dalam tiga tahapan meliputi tahap penyadaran, tahap peningkatan kapasitas, dan tahap perlindungan sosial. Ada hambatan di setiap tahapannya. Dengan memberdayakan masyarakat melalui KUBE, anggota dapat memenuhi kebutuhan dasar, bergabung dengan kelompok, dan meningkatkan pendapatan usaha kelompok.</p> <p>Perbedaan dengan penelitian ini :</p>

					<ul style="list-style-type: none"> - Tahapan pemberdayaan yang digunakan dalam penelitian ini berbeda - Lokasi penelitian yang digunakan juga berbeda
6	Bagus Nugroho Putro, Saiman, dan Iradhad Taqwa Sihidi (2020)	Evaluasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Batu Kota Batu	Metode Kualitatif	<p>Indikator yang digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan KUBE di Kota Batu dengan menggunakan teori William dengan 6 kriteria :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Efektivitas - Efisiensi - Kecukupan - Perataan - Responsivitas - Ketepatan 	<p>Program KUBE di Kota Batu belum berjalan sesuai dengan yang diinginkan oleh Dinas Sosial Kota Batu. Berikut rincian mengenai evaluasi pelaksanaannya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Efektivitas Anggotanya tidak aktif berproduksi - Efisiensi Anggotanya masih bingung dalam pengelolaan dana dan hasil produksi yang dijual terkadang tidak laku - Kecukupan Belum mencukupi kebutuhan sehari – hari - Responsivitas Masih kurangnya dalam pendampingan dan monitoring maupun evaluasi dari pendamping - Ketepatan Proses penyalurannya sudah baik dan tepat, akan tetapi belum seluruhnya KUBE tersebut mandiri <p>Perbedaan dengan penelitian ini :</p>

					<ol style="list-style-type: none"> 1. Fokus penelitian yang berbeda, dikarenakan pada jurnal tersebut fokusnya pada evaluasi dari program KUBE sedangkan dalam penelitian ini proses pemberdayaan dilihat dari tahapan yang ada 2. Lokasi penelitian yang berbeda
7	Normawati Paulu, Tri Handayani Amaliah, dan Amir Lukum (2022)	Pengaruh Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Kecamatan Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Metode Kuantitatif	Variabel yang diteliti : X : Program kelompok usaha bersama Y : Peningkatan pendapatan masyarakat	<p>Program KUBE nya berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. Upaya KUBE merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan pendapatan anggotanya, sehingga KUBE dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di Kecamatan Tomini Kabupatennya Bolang Mongon Selatan. Dampak program KUBE berdampak nyata sebesar 76,8% terhadap peningkatan masyarakat. Sisanya sebesar 23,2% dipengaruhi oleh faktor selain variabel yang disurvei, seperti Program PNPM-Mandiri, Program Bantuan Kelompok Tani, dan Program Bantuan Modal Usaha.</p> <p>Perbedaan dengan penelitian ini :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Metode penelitian yang digunakan berbeda, dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif

					2. Lokasi penelitian yang diteliti juga berbeda
8	Paisal Rahmat (2021)	Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin di Kabupaten Padang Lawas Utara	Metode Kualitatif	Bentuk – bentuk pelaksanaan pemberdayaan ekonomi melalui KUBE	<p>Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kabupaten Padang Lawas Utara sudah berjalan dengan konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat secara umum. Anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) terlibat dalam berbagai kegiatan bisnis dan Dinas Sosial mendampingi, monitoring dan evaluasi dalam pengembangan usaha kelompok. Keberhasilan ini diukur dengan prinsip keadilan, kesetaraan, partisipasi, penghargaan atas etos kerja, dan tolong bantu</p> <p>Perbedaan dengan penelitian ini :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fokus penelitiannya yang berbeda, pada jurnal tersebut menekankan bentuk dari pemberdayaan ekonomi. Sedangkan penelitian ini tujuannya untuk menganalisis pelaksanaan serta dampak dari program KUBE 2. Lokasi yang diteliti berbeda
9	Reka Dwi Mashitoh, Nurul	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kelompok	Metode Kualitatif	- Gambaran pemberdayaan masyarakat melalui KUBE	Program KUBE sudah sejalan sesuai dengan apa yang sudah diharapkan,

	Umi Ati, dan Suyeno (2022)	Usaha Bersama (KUBE) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat		<ul style="list-style-type: none"> - Faktor pendukung program KUBE - Faktor penghambat program KUBE 	<p>walaupun belum sepenuhnya namun indikatornya sudah mulai terlihat diantaranya: 1) kesejahteraan masyarakat yang mulai membaik dengan adanya program pemberdayaan masyarakat sehingga output yang dihasilkan lebih maksimal yang berdampak terhadap pendapatan masyarakat. 2) penghambat dalam pemberdayaan masyarakat yang disebabkan oleh dana/modal yang terbatas sehingga program yang sudah ada menjadi terhambat, ditambah lagi keadaan pasar yang sepi dan persaingan yang ketat, serta terbatasnya bahan baku lokal.</p> <p>Perbedaan dengan penelitian ini :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jurnal tersebut selain melihat gambaran dari program KUBE, juga meneliti terkait faktor pendorong dan penghambat dari KUBE. Sedangkan penelitian ini selain melihat pelaksanaannya, juga meneliti terkait dampak yang ditimbulkan setelah adanya pelaksanaan pemberdayaan melalui KUBE 2. Lokasi yang diteliti berbeda
--	----------------------------	--	--	---	--

10	Siska Karunia, Jhon Wardie, Eka Nor Taufik (2020)	Strategi Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Pengembangan Kelompok Usaha Bersama (Studi Kasus Pada KUBE Fakir Miskin ‘Sama Handi’ di Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas)	Metode Kualitatif	Strategi pemberdayaan melalui analisis SWOT	<p>Strategi prioritas pemberdayaan masyarakat miskin adalah: (1) Strategi peningkatan populasi ternak, (2) Strategi penguatan kelembagaan kelompok, (3) Strategi peningkatan peningkatan kapasitas pendamping, (4) Strategi peningkatan peternak kapasitas, (5) Strategi konversi sampah menjadi pupuk organik dan biogas. Selanjutnya, untuk mendukung pengembangan KUBE 'Sama Handi' sebagai sentra agribisnis lumbung sapi, beberapa strategi yang dapat diterapkan, yaitu (1) meningkatkan sistem pemasaran dan pengelolaan ternak; (2) penguatan modal; (3) keterpaduan kawasan peternakan; dan (4) pembangunan infrastruktur penunjang peternakan</p> <p>Perbedaan dengan penelitian ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jurnal tersebut menekankan kepada analisis SWOT sebagai bentuk pengembangan pemberdayaan melalui KUBE 2. Lokasi yang diteliti berbeda
11	Tami Astari Zulkarnain, dkk (2020)	Implementasi Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dalam Pemberdayaan Fakir Miskin	Metode Kuantitatif	Pelaksanaan program KUBE dilihat berdasarkan keberhasilan dan penghambatnya	Pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk masyarakat miskin yang dilaksanakan oleh Bidang Pemberdayaan SDM miskin Provinsi Riau

					<p>Ada beberapa indikator yang harus diperhatikan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Keempat faktor ini penting karena dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan program KUBE. Apabila daerah-daerah pemberdayaan kemiskinan miskin di Provinsi Riau tidak dapat menjalankan keempat faktor tersebut, maka akan terjadi kendala yang dapat memicu kegagalan pelaksanaan program KUBE. Sedangkan faktor penghambat pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam pemberdayaan fakir miskin di Provinsi Riau antara lain 1) penggunaan dana bantuan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tidak tepat. 2) proses pencairan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tidak menentu. 3) modal usaha Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE). 4) kurangnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan bantuan Program KUBE pemerintah. 5) kurangnya pengetahuan dan keterampilan aparatur fakultas yang miskin pemberdayaan bakti sosial Provinsi Riau pelaksana program KUBE</p>
--	--	--	--	--	--

					Perbedaan dengan penelitian ini: 1. Jurnal tersebut menekankan kepada implementasi dari program KUBE 2. Lokasi yang diteliti berbeda
12	GU Rui dan NIE Feng-ying (2021)	Does Empowering Women Benefit Poverty Reduction? Evidence from a Multi-Component Program in the Inner Mongolia Autonomous Region of China	Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan di sembilan kabupaten miskin Kota Ulanqab di Daerah Otonomi Mongolia Dalam Cina pada akhir 2014, menghasilkan sampel 900 rumah tangga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dampak program multi-komponen pada pemberdayaan perempuan dan pengurangan kemiskinan 2. Peran yang dimainkan oleh perempuan yang diberdayakan dalam pengurangan kemiskinan 	Program tersebut memiliki efek positif pada pemberdayaan perempuan dan pengurangan kemiskinan secara bersamaan. Pemberdayaan perempuan juga berdampak positif terhadap pengentasan kemiskinan, dan perempuan yang menjadi penerima manfaat telah berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan dan taraf hidup rumah tangga.
13	E.A, Adjei, et.al (2022)	Assessing the Impact of Hydro Energy Project on Poverty Alleviation: The Case of Bui Dam in Ghana	Teknik random sampling digunakan untuk memilih responden untuk survei sedangkan	Variabel sebelum dan sesudah pembangunan bendungan. Variabel tersebut meliputi usia, jenis kelamin pendidikan dan keterampilan, pertanian, kesehatan, fasilitas sosial, energi, pekerjaan, pendapatan	Otoritas bendungan menyediakan layanan dan proyek pembangunan bagi masyarakat yang terkena dampak untuk mengentaskan kemiskinan. Anggota masyarakat yang menegaskan penyediaan listrik, sumur bor, pusat komunikasi dan fasilitas perumahan sekitar 73%. Kesempatan kerja bagi

			teknik purposive sampling digunakan untuk mewawancarai responden.	rumah tangga dan status migran.	masyarakat paruh baya juga meningkat lebih dari 75% sedangkan stabilitas ekonomi di pasar lebih dari 80%. Uji-t sampel berpasangan menunjukkan bahwa keberadaan energi air memiliki dampak yang signifikan terhadap lapangan kerja, pasokan energi, pertanian, kesehatan, fasilitas sosial dan infrastruktur dari orang-orang yang terkena dampak yang tinggal di komunitas Bui.
14	S.J, Sewell, et.al (2019)	A Comparative Study of Community Perceptions Regarding the Role of Roads as a Poverty Alleviation Strategy in Rural Areas	Metode campuran, menggunakan kombinasi teknik penelitian kuantitatif dan kualitatif.	Menganalisis isu-isu yang berkaitan dengan infrastruktur jalan pedesaan dan dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan	Perbedaan kondisi sosial ekonomi antara masyarakat dengan akses yang lebih baik (masyarakat Njane) dan masyarakat yang terisolasi (masyarakat Ntshasheni) karena infrastruktur jalan yang tidak memadai. Selain itu, temuan penelitian mengungkapkan bahwa infrastruktur jalan yang tidak memadai merupakan indikasi kurangnya akses masyarakat miskin terhadap layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan.
15	Laura Dubois(2021)	The Impact of Solidarity Economy on Poverty: The case of Public Centres of Solidarity Economy in Bahia, Brazil	Pendekatan kualitatif untuk membandingkan studi kasus dua CESOL, berdasarkan wawancara	Dampak kebijakan CESOL terhadap kemiskinan	CESOLs berinteraksi dengan tiga dimensi kemiskinan, sebagaimana para penerima manfaat menggambarkan peningkatan dalam kebutuhan bahan dasar, inklusi yang lebih baik ke dalam pasar dan pemberdayaan sosial-politik. Namun, perbandingan kedua CESOL menunjukkan

			dengan penerima manfaat dan karyawan CESOL.		bahwa keberhasilan usaha ekonomi solidaritas bergantung pada kerangka kelembagaan, termasuk bantuan teknis yang memadai dan akses ke investasi. Temuan ini menjadi indikasi potensi ekonomi solidaritas sebagai strategi pengentasan kemiskinan, terutama karena studi empiris tentang kebijakan ekonomi solidaritas – CESOL sebagai salah satu contohnya – masih dalam tahap awal.
--	--	--	---	--	---

Sumber : Peneliti

Peneliti menyajikan beberapa penelitian terdahulu sebagaimana yang terlampir diatas yang berkaitan dengan judul penelitian peneliti yaitu “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Nagari Balimbing, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat”. Penelitian terdahulu tersebut dijadikan sebagai referensi kajian pustaka bagi peneliti untuk penelitian ini. Selain itu, penelitian terdahulu digunakan sebagai pembeda bagi penelitian peneliti untuk membedakan fenomena – fenomena pada penelitian ini.

Pada penelitian fenomena yang akan peneliti teliti berkaitan dengan pelaksanaan pemberdayaan kepada kelompok penerima bantuan KUBE di Jorong Bukit Tamasu, Nagari Balimbing dilihat melalui indikator yaitunya tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap pengembangan usaha, dan tahap terminasi. Selain itu, dalam penelitian ini peneliti juga meneliti terkait dampak yang ditimbulkan setelah adanya pelaksanaan pemberdayaan kepada kelompok penerima bantuan KUBE di Jorong Bukit Tamasu, Nagari Balimbing dilihat melalui indikator yaitunya dampak positif, output (dampak hasil), dan outcome (dampak manfaat).

1.5.2 Administrasi Publik

Berikut beberapa pendapat ahli terkait administrasi publik :

- a. Administrasi publik adalah melakukan kekuasaan atau kegiatan politik sebagai kegiatan dari pemerintah (Marshall E. Dimock, Gladys O. Dimock, dan Louis W Koenig).
- b. Administrasi publik adalah pelaksanaan hukum atau aturan yang dikeluarkan oleh badan eksekutif, legislatif, serta yudikatif yang dilaksanakan oleh organisasi/kelompok maupun perseorangan (George J. Gordon).
- c. Administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari terkait penerapan dari politik negara (Arifin Abdulrachman).
- d. Administrasi publik merupakan negara yang dikatakan sebagai organisasi dan administrasi dengan tujuannya untuk mencapai hal – hal terkait kenegaraan (Prajudi Atmosudirojo).
- e. Administrasi publik adalah ilmu yang berkaitan dengan badan pemerintahan yang diatur, dilengkapi dengan tenaganya, dibiayai, dijalankan dan dipimpin (Edward H. Litchfield).

1.5.2.1 Paradigma Administrasi Publik

I. Dikotomi Politik & Administrasi (1900 – 1926)

Dikotomi politik dan administrasi didefinisikan sebagai pemisahan antara politik dan fungsi administrasi pemerintahan sebagai strategi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Berdasarkan pendapat Basheka

(2012) mengatakan bahwa Woodrow Wilson sebagai pelopor paradigme ini menyebutkan ada 4 kriteria administrasi publik yang efektif meliputi :

- a. Pemisahan politik dan administrasi
- b. Analisis komparatif organisasi politik dan swasta
- c. Peningkatan efisiensi melalui praktik dan sikap
- d. Peningkatan efektivitas pelayanan publik melalui manajemen, pelatihan pegawai negeri, dan penilaian berbasis prestasi

II. Prinsip – Prinsip Administrasi (1927 – 1937)

Prinsip – prinsip administrasi merupakan kemajuan menuju orientasi manajemen ke status ilmu pengetahuan. Basheka (2012) dalam Gulick & Urwick (1937) ada 7 indikator dari prinsip – prinsip administrasi meliputi: perencanaan, pengorganisasian, kepegawaian, pengarahan, koordinasi, pelaporan, dan penganggaran.

III. Administrasi Publik sebagai Ilmu Politik (1950 – 1970)

Menurut Henry (1975) menyebutkan bahwa paradigme ini sebagai bentuk pemberontakan ilmuwan politik untuk merebut kembali administrasi publik. Lebih lanjut Basheka (2012) juga menjelaskan bahwa periode ini sebagai bentuk untuk mengempiskan dikotomi dan meniskus prinsip – prinsip. Konsekuensinya, dikotomi politik dan administrasi terbantahkan dengan alasan bahwa tidak dapat dipisahkannya administrasi dari politik di dunia pemerintahan.

IV. Administrasi Publik sebagai Manajemen (1956 – 1970)

Menurut Henry (1975) mengatakan bahwa paradigma ini sebagai win – win solution untuk ilmu politik dikarenakan beberapa sarjana menyatakan perspektif atau pandangan manajemen sebagai administrasi publik.

V. Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik (1970 – Sekarang)

Paradigma administrasi publik sebagai administrasi publik dikenal sebagai pendekatan New Public Management (NPM). Paradigma ini muncul untuk menghadapi masalah yaitunya inefisiensi dalam sistem administrasi. Adminitrasi publik konvensional menganggap pemerintah sebagai aktor yang otonom dan otoritas melalui struktur dan proses birokrasi, hirarki, dan pelayanan publik. NPM muncul sebagai perubahan dengan menggunakan sektor swasta. Dengan kata lain NPM sebagai bentuk pendekatan perpaduan yang menggunakan prinsip – prinsip swasta pada sektor publik.

VI. *Governance* (1990 – Sekarang)

Paradigma *governance* merupakan gambaran dari proses fundamental pemerintahan modern yang berbeda dari cara atau tindakan pemerintahan tradisional. Menurut Ikeanyibe (2016) menyebutkan bahwa pada *governance* terdapat proses politik yang luas dimana adanya partisipasi kelompok dalam kebijakan dan program pemerintah yang sangat penting. Lebih lanjut Stoker (1998) mengemukakan 5 poin kritis yang telah diadopsi menjadi prinsip – prinsip paradigma *governance* meliputi :

1. Jaringan institusi dan aktor (di dalam dan di luar pemerintahan)
2. Mengaburkan batasan dan tanggung jawab untuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi
3. ketergantungan kekuasaan di antara lembaga-lembaga yang terlibat dalam aksi kolektif
4. Jaringan aktor otonom
5. kemampuan untuk melakukan hal-hal yang independen dari pelaksanaan kewenangan pemerintah

Berdasarkan pemaparan diatas, paradigma yang digunakan di dalam penelitian ini adalah paradigma *governance*. Paradigma ini menjelaskan masyarakat sebagai sasarannya atau objek di dalam pelayanan publik dan pemerintah sebagai fasilitatornya. Kaitannya dengan penelitian ini dikarenakan konsep pemberdayaan kepada masyarakat yang direncanakan oleh pemerintah untuk memberdayakan masyarakat sasaran (miskin) melalui bantuan KUBE (Kelompok Usaha Bersama).

1.5.3 Manajemen Publik

Manajemen merupakan seni dalam menyelesaikan pekerjaan oleh orang lain, dikemukakan oleh Mary Parker Follet. Manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemantauan upaya anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi tertentu, dikemukakan oleh James A. Stoner.

Berdasarkan penelitian dari Rainey dan Han Chun (2005, h.92 – 94) menyebutkan beberapa hal mengenai manajemen publik diantaranya :

1. Lingkungan di bidang administrasi publik adalah kurangnya orientasi ekonomi dalam pemerintahan dan tingginya pengaruh aspek politik internal dan eksternal, yang berarti bahwa pengelolaan sektor publik dipengaruhi oleh mekanisme politik dan negara seperti lobi negosiasi dan opini publik. Artinya terpengaruh.
2. Pemerintah berada di bawah tekanan kuat untuk keadilan, daya tanggap, kejujuran, keterbukaan dan akuntabilitas.
3. Adanya peran, struktur, dan proses organisasi yang menyebabkan tingginya tingkat ambiguitas dan konflik mengenai tujuan organisasi, proses birokrasi dan membingungkan, lambat dan tidak inovatif.

1.5.4 Kemiskinan

Kemiskinan menurut Suharto (2010 : 134) diartikan dari segi ekonomi, khususnya berkaitan dengan pendapatan dalam bentuk uang ditambah dengan keuntungan non material yang diterima seseorang. Pendapat lain mengenai kemiskinan dikemukakan oleh Badan Pusat Statistik dan Kementerian Sosial yang mengatakan bahwa kemiskinan adalah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum atau batasan kemiskinan.

Suharto (2009) menjelaskan mengenai dimensi – dimensi kemiskinan meliputi :

- a. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar
- b. Kurangnya akses untuk memenuhi kebutuhan lain seperti kesehatan, pendidikan dan kebersihan
- c. Tidak adanya jaminan masa depan keluarga
- d. Adanya sikap rentan individu
- e. Rendahnya kualitas SDM dan terbatasnya SDA
- f. Kurangnya partisipasi dalam kegiatan sosial
- g. Tidak adanya akses lapangan pekerjaan
- h. Terbatasnya kemampuan untuk berusaha dikarenakan cacat fisik maupun mental
- i. Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial seperti anak terlantar, kelompok marjinal dan terpencil

Menurut pendapat Harniati (2010) menjelaskan tiga jenis kemiskinan meliputi :

1) Kemiskinan alamiah

Kemiskinan alamiah disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya alam dan manusia. Oleh karena itu, potensinya rendah.

2) Kemiskinan kultural

Kemiskinan kultural berkaitan dengan sikap individu atau kelompok dalam masyarakat yang tidak mau meningkatkan taraf hidupnya walaupun dengan dukungan dari pihak lain.

3) Kemiskinan struktural

Kemiskinan struktural berarti disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh tatanan kelembagaan atau struktur sosial dalam masyarakat.

1.5.5 Pemberdayaan

Menurut asal katanya, pemberdayaan berasal dari kata dasar daya yang artinya kekuatan. Dalam bahasa Inggrisnya yaitu *empowerment*, yang diartikan lebih luas adalah memberikan kekuatan kepada kelompok yang lemah untuk hidup mandiri terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sehari – hari seperti makan, pakaian, rumah, pendidikan, dan kesehatan.

Menurut Mardikanto dan Soebianto (2012 : 61) menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan mengoptimalkan keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk di dalamnya individu yang mengalami kemiskinan. Pendapat lain dikemukakan oleh Suharto (2010 : 58) menjelaskan bahwa pemberdayaan menunjuk kepada kemampuan orang, terkhususnya kelompok rentan dan lemah sehingga memiliki kemampuan dalam hal meliputi : (1) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga memiliki kebebasan atas kelaparan, kebodohan, dan kesakitan, (2) menjangkau sumber – sumber produktif yang memungkinkan masyarakat dapat meningkatkan pendapatan dan memperoleh barang serta jasa yang dibutuhkan, (3) ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan keputusan yang mempengaruhinya.

Secara umum tujuan utama pemberdayaan adalah untuk meningkatkan kekuatan masyarakat, terutama kelompok rentan yang tidak berdaya akibat kondisi

internal dan eksternal. Sedangkan menurut Mardikanto dan Poerwoko (2012 : 111-112), tujuan pemberdayaan meliputi berbagai upaya perbaikan yang meliputi: (1) perbaikan pendidikan, (2) perbaikan aksesibilitas, (3) perbaikan perilaku, (4) perbaikan kelembagaan, (5) perbaikan usaha, (6) perbaikan pendapatan, (7) perbaikan lingkungan, (8) perbaikan kehidupan, dan (9) perbaikan masyarakat.

1.5.6 Masyarakat

Berikut beberapa definisi masyarakat menurut ahli meliputi :

1. Menurut pendapat Linton menjelaskan masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup cukup lama dan bekerja sama dalam kelompok untuk membentuk suatu organisasi yang mengatur individu-individu dan melihat dirinya sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang jelas.
2. Menurut J.L Gillin menjelaskan masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki kebiasaan, tradisi, sikap, dan identitas yang sama.
3. Menurut M.J Heskovits menjelaskan bahwa masyarakat merupakan kelompok individu yang mengatur, mengorganisasikan, mengikuti cara hidup tertentu.

Secara umum karakteristik masyarakat meliputi:

- 1) Aglomerasi unit biologis yang dapat melakukan reproduksi dan beraktivitas
- 2) Ada wilayah
- 3) Mempunyai cara untuk komunikasi
- 4) Adanya diskriminasi warga masyarakat dan non warga masyarakat
- 5) Secara bersama menghindari maupun menghadapi musuh

1.5.7 Pemberdayaan Masyarakat

Gunawan (2009 : 102) mendefinisikan pemberdayaan masyarakat sebagai tindakan sosial sebuah komunitas yang mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif dalam rangka memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki.

Sumaryadi (2005 : 114 – 115) menjelaskan tujuan dan sasaran dari pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

- Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah: (1) Mendukung pembangunan manusia yang sejati dan esensial bagi kelompok-kelompok lemah, rentan, miskin dan kecil, termasuk pekerja pedesaan, masyarakat berkembang, dan kaum miskin. (2) memberdayakan kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomi agar dapat lebih mandiri, memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dan berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat.
- Sasaran dari program pemberdayaan masyarakat dalam usaha mencapai kemandirian masyarakat meliputi : (1) meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam berorganisasi untuk kemajuan dan kemandirian bersama. (2) Meningkatkan taraf hidup yang lemah, lemah, tidak berdaya dan miskin melalui pemahaman yang lebih baik, peningkatan pendapatan dan tindakan menuju kemandirian usaha kecil dan menengah di berbagai sektor ekonomi. (3) meningkatkan kapasitas dan kinerja kelompok dalam keterampilan teknis dan manajerial untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan kelompok.

Di dalam pemberdayaan kepada masyarakat terdapat serangkaian tahapan (proses) dalam pelaksanaannya berdasarkan pendapat dari Soekanto meliputi :

a. Tahapan persiapan

Dalam tahapan ini ada dua hal yang dikerjakan yaitu nya : (1) menyiapkan petugas pemberdayaan yang dikenal sebagai pekerja masyarakat, (2) menyiapkan lapangan.

b. Tahapan pengkajian

Dalam tahapan ini petugas melakukan identifikasi masalah di lapangan “feel needs” dan sumber daya yang dimiliki klien. Dengan tujuan agar program yang dilaksanakan tidak salah sasaran atau merespon kebutuhan dan kemungkinan yang ada di masyarakat.

c. Tahapan perencanaan alternatif program atau kegiatan

Dalam tahapan ini petugas sebagai agen perubahan dimana mengikutsertakan masyarakat untuk berfikir terkait masalah yang dihadapi dan bagaimana solusinya. Bentuk nyatanya, masyarakat ikut andil memikirkan atau mempertimbangkan alternatif program yang akan dilaksanakan.

d. Tahapan pemformalisasi rencana aksi

Dalam tahapan ini petugas membantu untuk merumuskan dan menentukan program masing – masing kelompok untuk mengatasi permasalahannya. Selain itu, gagasan yang telah diputuskan dijadikan dalam bentuk tulisan melalui pembuatan proposal kepada donator.

e. Tahapan implementasi program

Dalam tahapan ini petugas dan masyarakat sasaran (kelompok) bekerja sama dalam melaksanakan program yang telah disusun agar terjadi keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Pada tahapan ini terlebih dahulu disosialisasikan maksud, tujuan, dan sasaran program agar nantinya saat diimplementasikan tidak terjadi kendala.

f. Tahapan evaluasi

Dalam tahapan ini adanya proses pengawasan petugas lapangan pemberdayaan dengan melibatkan masyarakat. Adapun bentuk evaluasi yang dilakukan dengan melihat secara jelas dan terukur terkait seberapa besar keberhasilan program yang dilaksanakan tercapai sehingga diketahui kendala – kendala yang bisa diantisipasi pada periode selanjutnya.

g. Tahapan terminasi

Dalam tahapan ini diharapkan masyarakat yang telah diberdayakan mampu untuk mengatur dirinya sendiri lebih baik dimana sebelumnya kurang bisa menjamin kelayakan hidup keluarganya.

Berdasarkan pendapat dari Mardikanto, et.al, (2012 : 78) dalam (Dean Gilbert Mahino, et.al, 2018) mengemukakan bahwa dampak dari pelaksanaan pemberdayaan kepada sosial ekonomi masyarakat melalui aspek sebagai berikut :

a) Dampak positif

Maksudnya adalah situasi dimana kegiatan itu berlangsung semakin meningkat. Peningkatan tersebut dapat berupa sikap perilaku, kesejahteraan, partisipasi, dan perilaku sosial lainnya.

b) Dampak negatif

Maksudnya adalah situasinya telah memburuk dari masa lalu, dan sebagai akibatnya masyarakat menuju ke arah yang lebih buruk.

c) Output

Maksudnya adalah hasil yang didapatkan dari suatu kegiatan atau keputusan yang berhasil menjadi sebuah inovasi.

d) Outcome

Maksudnya adalah adanya suatu bentuk manfaat atau keuntungan yang dirasakan oleh masyarakat atau kelompok sosial terkait.

1.5.8 Program KUBE

Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Yogyakarta (2013 : 307) mendefinisikan mengenai KUBE sebagai salah satu program penanggulangan kemiskinan pemerintah yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial terkhusus pada Bidang Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, tujuannya untuk memberdayakan masyarakat miskin dengan cara memberikan modal usaha melalui program Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) untuk mengelola usaha ekonomi produktif (UEP).

Kementerian Sosial RI (2010 : 13) menjelaskan mengenai tujuan dari KUBE yaitu :

- a Meningkatkan kemampuan pemenuhan kebutuhan sehari-hari anggota KUBE

- b Meningkatkan kemampuan anggota KUBE untuk menghindari dan menghadapi masalah yang timbul baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sosial
- c Meningkatkan kemampuan anggota Kelompok KUBE dalam menjalankan peran sosialnya

Kementerian Sosial RI (2010 : 17 – 21) menjelaskan mengenai kelembagaan yang ada pada KUBE meliputi :

- a. Kriteria anggota :
 - Pendapatan keluarga miskin di bawah standar
 - Memiliki domisili tetap
 - Adanya keinginan untuk bergabung di dalam kelompok
 - Mempunyai potensi dan keterampilan pada bidang usaha tertentu
- b. Anggota KUBE berjumlah 10 kepala keluarga
- c. Pembentukan KUBE dengan mempertimbangkan :
 - Lokasi rumah yang berdekatan
 - Jenis usaha
 - Tersedianya sumber
 - Dilatarbelakangi oleh kehidupan budaya
 - Memiliki keinginan yang sama
 - Kelompok masyarakat yang sudah lama berkembang
- d. Struktur dan Kepengurusan KUBE
 - Struktur organisasi adalah kewajiban yang harus dilaksanakan
 - Struktur KUBE berkaitan dengan kegiatan atau jenis usaha yang dijalankan

- Kepengurusannya didapatkan melalui hasil musyawarah anggota kelompok
- Struktur organisasinya relatif sederhana yang terdiri atas : ketua, sekretaris, dan bendahara

Uraian tugasnya sebagai berikut :

- i. Ketua
 - Mengorganisasikan kegiatan KUBE
 - Melakukan pengendalian KUBE
 - Memimpin pertemuan
 - Mengesahkan hasil musyawarah kelompok
 - Menandatangani dokumen yang menjadi kewenangan dan kewajiban dari ketua KUBE
- ii. Sekretaris
 - Melakukan pelayanan administrasi KUBE
 - Menggantikan ketua jika berhalangan
 - Menandatangani dokumen yang menjadi kewenangan dan kewajiban dari sekretaris
- iii. Bendahara
 - Melakukan administrasi keuangan KUBE
 - Menandatangani dokumen yang menjadi kewenangan dan kewajiban dari bendahara
- iv. Kewajiban anggota
 - Mematuhi kesepakatan yang ditentukan
 - Berusaha mencapai tujuan yang diinginkan

- Adanya kerja sama dengan pihak lain
 - Menggunakan dana bantuan modal usaha dengan rasa tanggung jawab
 - Iuran dana kesetiakawanan sosial (IKS) harus dibayar setiap bulan sesuai kesepakatan kelompok
 - Mengumpulkan dana untuk memperkuat modal melalui lembaga keuangan mikro
 - Memanfaatkan penghasilan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota keluarganya
- v. Hak anggota
- Mengemukakan saran yang dapat memperbaiki kinerja KUBE
 - Mendapatkan pinjaman bantuan modal usaha yang diterima KUBE dari pihak lain
 - Adanya keuntungan yang didapatkan melalui pembagian hasil KUBE

Pembaharuan mengenai pengelolaan KUBE berdasarkan pedoman KUBE dari Kementerian Sosial (2011 : 31) (dalam Dessy Permatasari Pratiwi & Retno Sunu Astuti) terdapat beberapa tahapan meliputi :

1. Tahap persiapan

Terdiri atas : orientasi dan observasi, registrasi dan identifikasi, dan perencanaan program pelaksanaan.

2. Tahap pelaksanaan

Terdiri atas : sosialisasi program kepada masyarakat, seleksi dan pembentukan kelompok, pemilihan jenis usaha, penyaluran bantuan modal usaha, dan pendampingan.

3. Tahap pengembangan usaha

Terdiri atas : pengembangan jenis usaha, monitoring, dan evaluasi

4. Tahap terminasi

Tahap akhir dari pemberdayaan dengan ketentuan : KUBE sudah mandiri atau KUBE berhenti (kelompok bubar).

1.6 Operasionalisasi Konsep

Pemberdayaan masyarakat melalui program KUBE di Jorong Bukit Tamasu, Nagari Balimbing dilihat berdasarkan pelaksanaan pemberdayaan kepada kelompok penerima bantuan KUBE di Jorong Bukit Tamasu, Nagari Balimbing dan dampak yang ditimbulkan setelah adanya pemberdayaan kepada kelompok penerima bantuan KUBE di Jorong Bukit Tamasu, Nagari Balimbing.

Fenomena yang diteliti untuk melihat pelaksanaan pemberdayaan kepada kelompok penerima bantuan KUBE meliputi :

1. Tahap persiapan

Dalam tahap persiapan terdapat indikator – indikator meliputi:

- Orientasi dan observasi
- Registrasi dan identifikasi
- Perencanaan program pelaksanaan

2. Tahap pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan terdapat indikator – indikator meliputi:

- Sosialisasi program kepada masyarakat
- Seleksi dan pembentukan kelompok

- Pemilihan jenis usaha
- Penyaluran bantuan modal usaha
- Pendampingan

3. Tahap pengembangan usaha

Dalam tahap pengembangan usaha terdapat indikator – indikator meliputi :

- Pengembangan jenis usaha
- Monitoring
- Evaluasi

4. Tahap terminasi

Dalam tahap terminasi ini dilihat apakah KUBE sudah mandiri atau belum.

Fenomena yang diteliti untuk melihat dampak yang ditimbulkan setelah adanya pemberdayaan kepada kelompok penerima bantuan KUBE meliputi :

1. Dampak positif

Dampak positif adalah peningkatan keadaan berupa sikap perilaku, kesejahteraan, partisipasi, dan tingkah sosial lainnya.

2. Output

Output adalah hasil yang diperoleh dari suatu kegiatan.

3. Outcome

Outcome adalah manfaat yang dirasakan oleh masyarakat atau kelompok sosial dalam masyarakat.

1.7 Argumen Penelitian

Masalah kemiskinan masih menjadi permasalahan yang mendasar bagi negara berkembang seperti Indonesia. Dalam upaya mengatasinya, salah satu langkah yang diambil melalui pemberdayaan kepada masyarakat. Pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai usaha memberikan daya kepada kelompok yang dianggap “lemah” agar memiliki “kekuatan” di dalam meningkatkan taraf hidupnya. Tindakan ini bisa dilakukan oleh pemerintah, swasta, maupun lembaga masyarakat seperti LSM. Pemerintah Indonesia sendiri melalui Kementerian Sosial RI melakukan berbagai upaya program dalam usaha meningkatkan kesejahteraan terhadap masyarakat. Salah satunya adalah melalui bantuan program KUBE (Kelompok Usaha Bersama). KUBE dikenal sebagai upaya pemberdayaan secara berkelompok kepada masyarakat yang dikategorikan belum mampu atau kehidupannya masih di bawah standar dengan cara melakukan usaha secara bersama agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Nagari Balimbing yang berada di kawasan Kecamatan Rambatan salah satu daerah yang menerima bantuan KUBE ini. Hal ini dikarenakan wilayah Kecamatan Rambatan merupakan satu diantara wilayah kecamatan dengan jumlah penduduk miskin yang angkanya tinggi yang berada di kawasan Kabupaten Tanah Datar. Oleh karenanya, diberikanlah bantuan melalui KUBE untuk nagari – nagari yang berada di wilayah Kecamatan Rambatan. Dalam penelitian ini peneliti akan meneliti mengenai “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Nagari Balimbing, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat”.

1.8 Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2006 : 2) metode penelitian merupakan suatu cara yang sifatnya ilmiah dalam rangka untuk mendapatkan data demi tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah yang dimaksud adalah sesuai dengan ciri keilmuan meliputi rasional, empiris, dan sistematis. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut pendapat Williams (2008) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian lainnya dikarenakan ada beberapa poin penting meliputi :

- 1) Pemikiran dasarnya bersifat fakta, adanya hubungan antara peneliti dengan yang diteliti, penarikan kesimpulan secara general, adanya hubungan kausalitas, dan adanya nilai pada penelitiannya
- 2) Adanya karakteristik tersendiri pada penelitian kualitatif
- 3) Berkaitan dengan proses pada penelitiannya

1.8.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif maksudnya untuk menggambarkan gejala maupun kejadian di lapangan secara sistematis dan akurat pada daerah tertentu. Berkaitan dengan penelitian ini, dimaksudkan untuk mengetahui dan menggambarkan mengenai bagaimana keadaan terkait proses pemberdayaan melalui KUBE di Jorong Bukit Tamasu, Nagari Balimbing yang dilihat berdasarkan tahapan – tahapan pemberdayaan yang ada. Selain itu, juga untuk melihat dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan

pemberdayaan kepada kelompok penerima bantuan KUBE di Jorong Bukit Tamasu, Nagari Balimbing.

1.8.2 Situs Penelitian

Situs penelitian berkenaan dengan lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian. Lokasi penelitian ini adalah di Jorong Bukit Tamasu, Nagari Balimbing, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian berkenaan dengan narasumber dalam penelitian. Pada penelitian ini, narasumbernya meliputi :

- a. Penerima bantuan KUBE di Jorong Bukit Tamasu
- b. Kepala Jorong Bukit Tamasu
- c. Pendamping KUBE Wilayah Kecamatan Rambatan
- d. Pegawai Dinas Sosial & PPPA Kabupaten Tanah Datar
- e. Sekretaris Dinas Sosial & PPPA Kabupaten Tanah Datar

1.8.4 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini sifatnya adalah data kualitatif. Hal ini dikarenakan pada saat pembuatan laporan penelitian bentuknya adalah narasi atas kejadian yang sebenarnya yang ditemukan di lapangan.

1.8.5 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer berdasarkan temuan langsung di lapangan, sedangkan data

sekunder melalui studi pustaka atas penelitian – penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya maupun pemikiran teoritis yang dikembangkan oleh para ahli.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui metode yaitu :

I. Observasi

Observasi merupakan kegiatan dengan melakukan pengamatan terhadap gejala yang diteliti melalui penglihatan indera mata maupun pendengaran indera telinga.

II. Wawancara

Wawancara sebagai bentuk percakapan yang dilakukan antara responden dengan peneliti. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui informasi secara mendalam terkait fenomena penelitian. Adapun wawancara yang akan dilakukan adalah dengan wawancara terbuka terhadap narasumber.

III. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dari bukti – bukti yang akurat seperti data statistik, informasi melalui studi pustaka baik buku maupun jurnal, dan referensi lainnya.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Adapun bentuk dari analisis dan interpretasi data setelah adanya pengumpulan data di lapangan berdasarkan pendapat dari Miles dan Huberman meliputi :

a. Reduksi data

Reduksi data umumnya berbentuk deskripsi data kualitatif deskriptif. Reduksi data adalah pilihan, lebih diutamakan daripada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data yang berasal dari catatan lapangan (Patilima, 2004).

b. Penyajian data

kegiatan mengumpulkan kumpulan informasi untuk menarik kesimpulan dan menawarkan kesempatan untuk bertindak. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data meliputi uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flow card, dan lain-lain.

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Simpulan diartikan sebagai intisari dari temuan di lapangan yang menggambarkan pendapat terakhir berdasarkan uraian sebelumnya. Simpulan dalam penelitian kualitatif adalah sebuah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada berupa deksripsi objek yang sebelumnya belum jelas, akan tetapi setelah diteliti menjadi jelas dan interaktif.

1.8.8 Kualitas Data

Kualitas data berkaitan dengan triangulasi data. Maksudnya adalah adanya penggabungan dari teknik pengumpulan data dan sumber data yang digunakan.

Oleh sebab itu, terdapat triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Triangulasi teknik didefinisikan sebagai penggunaan teknik pengumpulan data yang berbeda – beda untuk mengumpulkan data dari sumber yang sama. Pada penelitian ini, triangulasi tekniknya meliputi observasi, wawancara terbuka, dan dokumentasi. Triangulasi sumber adalah mendapatkan data dari sumber yang berbeda – beda dengan teknik yang sama. Pada penelitian ini, sumber primernya melalui wawancara terbuka terhadap narasumber yang dibutuhkan meliputi : penerima bantuan KUBE Nagari Balimbing, Kepala Jorong Bukit Tamasu, pendamping KUBE Wilayah Kecamatan Rambatan, pegawai Dinas Sosial & PPPA Kabupaten Tanah Datar, serta sekretaris Dinas Sosial & PPPA Kabupaten Tanah Datar.